



---

## Menyingkap Makna Kata *Gratis* dan Pembentukan Subjek dalam Program Makan Bergizi Gratis

---

Julio Lorenzo Kapele  
Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng  
kapelejulio@gmail.com

Diajukan: 19 Juni 2026 ; Direview: 10 Juli 2026 ; Diterima: 17 Juli 2026 ; Dipublish: 31 Juli 2026

---

**ABSTRACT:** *This study explores the meaning of the term “free” (gratis) in public policy, focusing on the Makan Bergizi Gratis (MBG) program, and its role in shaping subjectivity in the relation between society and the state. Using a qualitative hermeneutic approach, this research relies on library study and applies a dialectical analysis of thesis, antithesis, and synthesis. The thesis views “free” as a neutral term indicating the absence of cost. The antithesis, based on Michel Foucault and Pierre Bourdieu, argues that language operates within discourse and symbolic power, shaping social reality. The synthesis proposes a holistic view in which “free” functions both as a communicative tool and as a socially constructed concept rooted in collective participation. The study finds that the term not only describes policy but also subtly positions society as passive recipients, thus requiring a more critical and reflective understanding.*

**KEY WORDS:** *gratis*; Makan Bergizi Gratis; pembentukan subjek; diskursus; kekuasaan simbolik

### Pendahuluan

Pada 8 Januari 2026, pemerintah republik Indonesia resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini terkait dengan distribusi makanan gratis ke sekolah-sekolah serta posyandu. Dalam implementasinya, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memenuhi ketentuan yang ada terkait program MBG. Sasaran dari program ini mencakup berbagai elemen, baik pendidikan, anak usia dibawah lima tahun, ibu hamil, dan kelompok lain yang membutuhkan pemenuhan gizi. Titik berangkat dari program ini jelas, yaitu menyelesaikan masalah stunting yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam peluncuran program MBG, berbagai macam reaksi publik muncul sebagai bentuk tanggapan atas program ini. Dalam kaitannya dengan reaksi

---

<sup>1</sup> Reni Saptati, “Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya,” Media Keuangan, 2025, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>.

publik, salah satu komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, mengusulkan agar kata *gratis* dalam program tersebut dihapuskan karena memiliki konotasi negatif meskipun tujuan programnya sebenarnya sangat baik.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut merupakan bentuk reaksi, sekaligus mengimplikasikan bahwa penggunaan kata *gratis* dapat memunculkan ambiguitas dalam berbagai persepsi.

Selain fenomena peluncuran tersebut, penggunaan istilah *gratis* juga dapat menghadirkan kompleksitas persepsi dari masyarakat. Dalam penggunaannya sehari-hari, istilah *gratis* sering diasosiasikan sebagai kondisi secara cuma-cuma/tanpa biaya. Namun, dalam konteks pelayanan publik seperti program MBG, istilah *gratis* memungkinkan adanya ambiguitas dan implikasi sosialnya. Karena, layanan publik yang diselimuti dengan istilah *gratis* sejatinya dilahirkan dari partisipasi publik/masyarakat dalam berbagai bentuk seperti pajak dan redistribusi. Artinya, istilah *gratis* dapat menciptakan ilusi semantik yang mengaburkan realitas ekonomi dibaliknya<sup>3</sup>. Jika ditarik sebagai sebuah pertimbangan diskursus, hal ini perlu untuk ditelaah karena terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan istilah dan realitas sosial.

Dalam konteks ini, bentuk linguistik yang digunakan oleh pemerintah dalam sebuah kebijakan publik turut membentuk persepsi serta hubungan masyarakat terhadap negara. Dan bertolak dari penggunaan istilah *gratis*, jika ditempatkan dalam pemahaman ini tentunya istilah tersebut tidaklah bersifat netral. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Michel Foucault (1972), diskursus tidak hanya menggunakan tanda untuk menunjuk sesuatu, tetapi memiliki dimensi yang melampaui bahasa itu sendiri.<sup>4</sup> Artinya, jika dilihat dariacamata ini; bahasa tidak netral, melainkan turut membentuk cara manusia melihat dunia. Mengutip Pierre Bourdieu (1991), bahwa kekuasaan bisa nampak dalam bahasa, kekuasaan yang tampak seperti bukan kekuasaan disebut sebagai kekuasaan simbolik, yang turut menentukan realitas sosial.<sup>5</sup> Ringkasnya, bahasa tidaklah bersifat netral, selalu ada predikat yang ikut membentuk subjek maupun cara subjek tersebut melihat realitas.

Pembacaan sebelumnya mengenai program Makan Bergizi Gratis dilihat oleh peneliti berorientasi pada implementasi kebijakan, baik ekonomi, efektivitas distribusi, serta dampaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan pemenuhan gizi. Ada pula

---

<sup>2</sup> detikSumut, “Ada Usulan Kata ‘Gratis’ Dihapus dari MBG, Ini Alasannya,” detiksumut, 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8141109/ada-usulan-kata-gratis-dihapus-dari-mbg-ini-alasannya>.

<sup>3</sup> Margarito, “‘GRATIS’ DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK,” kordinat.co, 2025, <https://koordinat.co/2025/10/20/gratis-dalam-konteks-pelayanan-publik>.

<sup>4</sup> Michel Foucault, *The Archaeology Of Knowledge And The Discourse On Language*, ed. oleh (Translated by A. M. Sheridan Smith) (New York: PANTHEON BOOKS, 1972), 49.

<sup>5</sup> Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. oleh John B. Thompson (Oxford: Polity Press, 1991), 166.

penelitian terdahulu yang menelaah mengenai dari perspektif filsafat. Namun, belum menyentuh pemahaman karakteristik penelitian ini. Penelitian ini tidak untuk menilai berhasil atau tidaknya penerapan program MBG, melainkan untuk melihat makna yang terkandung dari kata *gratis* serta cara subjek melihat dirinya dalam relasi dengan negara. Singkatnya, penelitian ini akan mengarah pada usaha memahami makna kata *gratis* serta *impact*-nya bagi setiap masyarakat ketika memahami posisinya dengan pemerintah.

Segala uraian di atas mengantarkan pembahasan pada titik-tolak penelitian yaitu, bagaimana kata ‘gratis’ dipahami dalam konteks kebijakan publik dan bagaimana istilah tersebut membentuk cara masyarakat melihat dirinya dalam relasi dengan negara? Dengan demikian, tujuan dari tulisan ini adalah untuk merefleksikan makna istilah kata *gratis* tidak hanya sebagai konsep linguistik, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang memengaruhi cara manusia memahaminya.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (berbasis hermeneutik), yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian secara holistik.<sup>6</sup> Tentunya juga berupaya memahami makna dari kata *gratis* dalam konteks kebijakan public serta melihatnya sebagai bagian dari proses pembentukan cara setiap subjek masyarakat melihat dirinya dalam horizon masyarakat-pemerintah. Layaknya penelitian pada umumnya, penelitian ini juga mencakup sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, yaitu dokumen kebijakan yang berkaitan dengan MBG. Sumber sekunder yaitu literatur yang relevan sebagai penunjang kerangka analisis, seperti beberapa karya dari Michel Foucault dan Pierre Bourdieu.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), juga dengan bantuan SDCS (*Summary Data Collection Scheme*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan cara deskriptif-interpretatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi makna istilah *gratis*, kemudian menafsirkannya dengan kerangka teori kedua tokoh yang sudah disebutkan di atas. Pada bagian pembahasan, peneliti menggunakan pembahasan *style* dialektik, yaitu adanya tesis-antitesis-sintesis. Pada bagian tesis peneliti menguraikan

---

<sup>6</sup> Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Fitria Idam Chalid, dan Heri Budianto, *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*, 1 ed. (Siduarjo: Nizamia Learning Center, 2023), 202.

makna kata *gratis* dalam perspesi umum. Selanjutnya, pada bagian antitesis, bahasa dalam perspektif kedua tokoh tadi. Dan antitesis hasil holistik antara tesis dan antitesis.

## Hasil dan Pembahasan

### *Gratis* Dalam Horizon Makna Sehari-hari

Melihat hakikatnya, bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bersifat arbitrer, yang digunakan oleh individu maupun kelompok sosial dalam berkomunikasi.<sup>7</sup> Dalam pemahaman yang demikian, istilah *gratis* diandaikan oleh khalayak umum sebagai sesuatu yang diberikan tanpa biaya atau tanpa pembayaran. Pemahaman ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang menyatakan bahwa istilah *gratis* berarti “cuma-cuma” atau “tanpa biaya”.<sup>8</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat diartikan sebagai situasi di mana individu atau kelompok memperoleh barang atau jasa tanpa harus terjadi resiprokalitas-ekonomi. Ringkasnya, istilah *gratis* sangatlah memiliki makna yang netral sehingga dapat ditempatkan dalam berbagai konteks.

Pemahaman yang sama mengenai *gratis* jika ditempatkan dalam konteks kebijakan publik juga memiliki makna yang sama. Artinya, jika pemerintah menggunakan *term* ini untuk merujuk pada situasi di mana masyarakat dapat mengakses kebijakan tersebut secara cuma-cuma (tanpa dipungut biaya) dapat dikatakan benar. Sebagai konkretisasi, kata *gratis* dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini mengartikan bahwa, masyarakat, terlebih khusus kelompok sasaran, dapat menerima layanan pemenuhan gizi tersebut tanpa dipungut biaya. Kerangka pemahaman ini mengartikan bahwa, penggunaan istilah *gratis* dalam program MBG adalah yang paling efektif dikarenakan paling gampang untuk dimengerti oleh khalayak umum.

Cara pandang pengertian *gratis* sebagai sesuatu yang netral sesuai dengan makna bahasa sebagai sarana representasi realitas. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Ludwig Wittgenstein (1922): “The proposition is a model of the reality as we think it is”.<sup>9</sup> Maknanya, bahasa dipahami sebagai representasi realitas sebagaimana dipahami oleh subjek, sehingga arti di dalam bahasa tersebut tidak bersifat problematis karena diterima sebagai sesuatu yang jelas. Dengan demikian, istilah *gratis* merupakan ungkapan yang dapat diterima secara langsung, dikarenakan

---

<sup>7</sup> Dina Adzkia Izzanti et al., “Hakikat Bahasa dalam Objek Kajian Linguistik” 3 (2025): 188–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/semantik.v3i1.1394>.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Gratis,” KBBI Daring, n.d.

<sup>9</sup> Ludwig Wittgenstein dan Bertrand Russel (Introduction), *Tractatus Logico-Philosophicus*, ed. oleh (Translated by C. K. Ogden) (New York: Project Gutenberg, 2021), 39.

merepresentasikan realitas (ketiadaan biaya), tanpa membutuhkan peninjauan lebih lanjut.

### **Gratis Dalam Jejaring Diskursus dan Kekuasaan**

Pengandaian bahwa penggunaan bahasa kebijakan publik terlebih khusus *gratis* sebagai representasi realita jika ditempatkan dalam kerangka pemikiran filsafat yang lebih kritis sepertinya tidak dapat diterima begitu saja. Sebagaimana sudah disinggung pada bagian pendahuluan, salah satu pemikir filsafat, yaitu Michel Foucault menolak paradigma bahasa sebagai medium netral. Menurutnya, diskursus tidak hanya menunjukkan makna secara harafiah tetapi melampaui makna representatifnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, makna istilah *gratis* akan dibedah lebih lanjut dikarenakan pengandaian *gratis* sebagai representasi realitas akan langsung runtuh jika ditempatkan dalam kerangka pemahaman filosofis.

Jika bahasa tidak bersifat netral, maka istilah *gratis* juga demikian. Jika pemikiran Foucault ditempatkan dalam konteks pembahasan ini tentunya akan menemukan fokus yang baru dari sekadar bahasa sebagai medan netral. Menurutnya, diskursus (bahasa) tidak lagi sekumpulan tanda (unsur penanda yang merujuk pada isi atau representasi), melainkan sebagai praktik-praktik yang secara sistematis membentuk objek-objek yang dibicarakan. Ia menyetujui bahwa diskursus tersusun dari tanda-tanda; tetapi yang terkandung di dalamnya lebih dari pada itu.<sup>10</sup> Dengan kata lain, realitas sosial seperti makna *gratis* tidaklah hadir sebelum bahasa, tetapi hadir sesudah bahasa sebagai hasil diskursus. Secara lebih tajam, menurutnya; dalam setiap masyarakat, produksi selalu dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan distribusikan.<sup>11</sup> Artinya, apa yang tampak dalam realitas layaknya *gratis* yang termanifestasi dalam bahasa, sesungguhnya merupakan hasil dari kekuasaan (selalu diatur). Ringkasnya, penggunaan istilah *gratis* tidak dapat dipahami sebagai deskripsi netral, melainkan sebagai bagian dari praktik diskursif yang membentuk cara pandang yang sebenarnya tidak lepas dari kekuasaan.

Dalam kaitannya dengan kekuasaan, hal ini juga dijelaskan secara lebih tajam oleh Pierre Bourdieu. Hal ini sudah disinggung pada bagian pendahuluan, bahwa bahasa dapatlah menjadi sebuah kekuasaan simbolik dengan syarat siapa lokutornya. Dalam pemahaman ini, menurut Bourdieu, kekuasaan simbolik mencapai efektivitas tertinggi ketika ia beroperasi dalam bentuk *doxa*, yaitu kondisi di mana suatu tatanan sosial

---

<sup>10</sup> Foucault, *The Archaeology Of Knowledge And The Discourse On Language*, 1972, 49.

<sup>11</sup> Michel Foucault, "The Discourse on Language," in *The Archaeology of Knowledge (Appendix)* (PANTHEON BOOKS, 1972), 216, <https://commons.princeton.edu/shakespeares-language/wp-content/uploads/sites/41/2017/09/Foucault-The-Discourse-on-Language.pdf>.

diterima sebagai sesuatu yang alamiah dan tidak dipertanyakan.<sup>12</sup> Cara berpikir yang demikian penting untuk ditelaah dalam kaitannya dengan istilah *gratis*, orang menerima begitu saja makna dari istilah *gratis* tanpa mempertanyakan apa yang melekat padanya. Lebih tajam lagi, apa yang menciptakan kekuatan kata-kata dan slogan, juga suatu kekuatan yang mampu mempertahankan atau menggoyahkan tatanan sosial, adalah kepercayaan terhadap legitimasi kata-kata tersebut dan lokutornya (pihak yang mengucapkan).<sup>13</sup> Dengan kata lain, istilah *gratis* memperoleh daya pengaruh bukan semata-mata karena merujuk pada ketiadaan biaya, tetapi karena diucapkan oleh otoritas yang dipercaya. Dengan demikian, *gratis* tidak hanya sekadar forma penyampaian informasi, tetapi secara halus mengarahkan cara masyarakat memahami kebijakan dari pemegang otoritas, sekaligus menjadikannya sebagai sesuatu yang tampak normal.

Analisis dari Foucault dan Bourdieu tentunya memberikan implikasi yang besar terhadap masyarakat penerima program MBG namun beroperasi secara laten. Dalam struktur pemikiran kedua tokoh tersebut, individu hadir tidak dalam bentuk yang otonom, melainkan dibentuk melalui jaringan praktik sosial yang mengarahkan cara berpikir dan bertindak para penerima MBG. Lebih dalam, penggunaan *term gratis* tidak hanya mengarahkan pemahaman terhadap kebijakan tersebut, tetapi juga turut membentuk posisi subjek para penerima program MBG. Masyarakat secara tidak sadar diposisikan sebagai pihak yang menerima, bukan sebagai bagian dari subjek yang turut berkontribusi dan menopang keberlangsungan program tersebut. Pergeseran ini berlangsung secara halus, sehingga tidak disadari dan diterima begitu saja sebagai sesuatu yang terberi (*the given*). Konsekuensinya, kesadaran yang terbentuk bersifat pasif tanpa melalui proses aktif dalam bentuk refleksi kritis. Maksudnya, para penerima tidak melihat secara reflektif apa yang melatar belakangi cara pandang mereka terhadap kata *gratis* dalam program MBG. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa, istilah *gratis* dalam program MBG tidak lagi sekadar istilah deskriptif (representasi realita), tetapi menjadi bagian dari praktik yang membentuk subjek memahami dirinya dalam relasi dengan pemerintah. Sehingga subjek yang dihasilkan adalah subjek yang telah diarahkan dalam suatu kerangka (konteks) tanpa menyadarinya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pierre Bourdieu, *Outline Of A Theory Of Practice*, ed. oleh (Translated by Richard Nice) (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 164–66.

<sup>13</sup> Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, 170.

<sup>14</sup> Michel Foucault, *The Archaeology Of Knowledge And The Discourse On Language* (New York: PANTHEON BOOKS, 1972); Bourdieu, *Language and Symbolic Power*.

## Rekonstruksi Makna *Gratis* dalam Relasi Sosial

Meskipun pembahasan bagian sebelumnya menunjukkan bahwa bahasa terlebih khusus *term gratis* tidaklah dapat dimengerti sebagai medium netral, akan tetapi penafsiran tersebut tidaklah meniadakan fungsi sarana komunikasi kebijakan publik. Lebih jelasnya mengenai sarana komunikasi kebijakan publik adalah: hal yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, dalam penyampaian, penerimaan, pemahaman akan kebijakan publik, dalam memahami tujuan serta implikasi dari kebijakan yang diambil.<sup>15</sup> Akan tetapi, pemaknaan terhadap *term gratis* dalam kerangka pemahaman holistik ini, tidaklah bisa dipahami secara transparan, haruslah didasari dengan refleksi mendalam. Maksudnya, dalam konteks program MBG, penempatan posisi si penerima haruslah dimengerti dalam bentuk partisipasi (*contributor*) aktif tidak hanya berhenti pada pemahaman pihak pasif. Partisipasi ini tentunya bersifat struktural, jelasnya, hal ini merupakan bagian dari redistribusi sumber daya publik.<sup>16</sup> Dengan kata lain, *term gratis* dalam pembahasan ini tidaklah ditolak, akan tetapi ditempatkan dalam posisi yang lebih hati-hati dan reflektif; ia masih bersifat oprasional sekaligus problematis, yaitu berguna dalam komunikasi, tetapi tidaklah bebas dari dimensi yang lebih dalam.

Pembacaan holistik mengenai makna istilah *gratis* tidaklah hanya berhenti pada pemahaman fakta ketiadaan biaya. Diperlukan cara pandang baru yang melihatnya sebagai komponen relasi sosial yang lebih multidimensional. Realitas *gratis* yang diandaikan dalam pemahaman harfiah nyatanya bersifat reduktif. Kenyataannya program MBG melibatkan kontribusi kolektif, baik melalui pajak dan bentuk partisipasi publik lainnya yang memungkinkan berjalannya program tersebut. Artinya, *gratis* tidaklah berdiri sendiri sebagai pemberian sepihak (dari pemerintah ke masyarakat), melainkan hasil konstruksi bersama (masyarakat dan pemerintah). Paradigma yang demikian penting untuk mengubah arah dari “masyarakat sebagai penerima”, menjadi “masyarakat sebagai kontributor”. Oleh karena itu, makna kata *gratis* di sini lebih relevan untuk dipahami sebagai hasil dari resiprokalitas masyarakat-pemerintah, bukan sebagai representasi harafiah (tanpa biaya).

---

<sup>15</sup> Diklat Pemerintah, “Teknik Komunikasi Kebijakan Publik agar Mudah Dipahami Publik,” Diklat Pemerintah Indonesia, 2025, <https://diklatpemerintah.id/teknik-komunikasi-kebijakan-agar-mudah-dipahami-publik/>.

<sup>16</sup> Nadia Amila, “Kemenkeu Klaim Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani APBN 2025,” pajak.com, 2025, <https://www.pajak.com/ekonomi/kemenkeu-klaim-program-makan-bergizi-gratis-tak-bebani-apbn-2025/>.

## Penutup

Pada akhirnya penelitian ini ditulis tidak untuk melibatkan diri pada validitas empiris, melainkan untuk menjejaki makna dari kata *gratis* yang sering kali memunculkan pertanyaan bahkan debat yang menimbulkan resistensi. Peneliti menyadari diperlukan diskursus akademik agar sekurang-kurangnya dapat mengatasi resistensi yang ada. Demikian, penelitian ini tidaklah berdiri pada salah satu paradigma. Artinya, penelitian ini tidak menjadikan baik cara pandang *gratis* sebagai representasi realitas, maupun *gratis* dalam jejaring diskursus dan kekuasaan sebagai acuan utama. Peneliti menawarkan cara pandang yang holistik, tentunya menempatkan kedua paradigma dalam tataran yang setara.

Dalam cara pandang holistik yang peneliti tawarkan, penggunaan istilah tersebut bekerja dalam dua lapisan sekaligus: sebagai sarana komunikasi yang menyederhanakan cara pandang terhadap realitas; dan sebagai praktik yang secara halus membentuk cara realitas itu dimengerti. Lebih lanjut, peneliti juga menyadari kekurangan penelitian ini yang masih berorientasi pada analisis konseptual-filosofis terhadap istilah *gratis* tanpa mengikut sertakan data empiris tentang bagaimana cara masyarakat secara konkret memaknai istilah *gratis*. Dengan menggunakan dua tokoh sebagai landasan pemikiran antitesis, yaitu Foucault dan Bourdieu; peneliti menyadari bahwa orientasi tulisan ini terbatas pada dua pemikir tersebut. Sebagai saran penelitian lanjutan, baiklah dilakukan penelitian empiris mengenai bagaimana masyarakat secara konkret memaknai istilah *gratis*, terlebih khusus bagi mereka para penerima program MBG.

## Daftar Pustaka

- Amila, Nadia. “Kemenkeu Klaim Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani APBN2025.” pajak.com, 2025. <https://www.pajak.com/ekonomi/kemenkeu-klaim-program-makan-bergizi-gratis-tak-bebani-apbn-2025/>.
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Diedit oleh John B. Thompson. Oxford: Polity Press, 1991.
- . *Outline Of A Theory Of Practice*. Diedit oleh (Translated by Richard Nice). Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- detikSumut. “Ada Usulan Kata ‘Gratis’ Dihapus dari MBG, Ini Alasannya.”

detiksumut, 2025. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8141109/ada-usulan-kata-gratis-dihapus-dari-mbg-ini-alasannya>.

Diklat Pemerintah. “Teknik Komunikasi Kebijakan Publik agar Mudah Dipahami Publik.” Diklat Pemerintah Indonesia, 2025. <https://diklatpemerintah.id/teknik-komunikasi-kebijakan-agar-mudah-dipahami-publik/>.

Foucault, Michel. *The Archaeology Of Knowledge And The Discourse On Language*. Diedit oleh (Translated by A. M. Sheridan Smith). New York: PANTHEON BOOKS, 1972.

———. *The Archaeology Of Knowledge And The Discourse On Language*. New York: PANTHEON BOOKS, 1972.

———. “The Discourse on Language.” In *The Archaeology of Knowledge (Appendix)*, 215–37. PANTHEON BOOKS, 1972. <https://commons.princeton.edu/shakespeares-language/wp-content/uploads/sites/41/2017/09/Foucault-The-Discourse-on-Language.pdf>.

Izzanti, Dina Adzkia, Muhammad Rizky Nasution, Habib Abdul Wasik, Muhammad Ilham Juanda, dan Sahkholid Nasution. “Hakikat Bahasa dalam Objek Kajian Linguistik” 3 (2025): 188–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/semantik.v3i1.1394>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Gratis.” KBBI Daring, n.d.

Margarito. “‘GRATIS’ DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK.” kordinat.co, 2025. <https://koordinat.co/2025/10/20/gratis-dalam-konteks-pelayanan-publik>.

Saptati, Reni. “Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimaannya.” Media Keuangan, 2025. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizi-gratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimaannya>.

Saputra, Mochammad Ronaldy Aji, Fitria Idam Chalid, dan Heri Budianto. *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*. 1 ed. Siduarjo: Nizamia Learning Center, 2023.

Wittgenstein, Ludwig, dan Betrand Russel (Introduction). *Tractatus Logico-Philosophicus*. Diedit oleh (Translated by C. K. Ogden). New York: Project Gutenberg, 2021.